

POTENSI PENGEMBANGAN LAHAN KETRANSMIGRASIAN PADA DESA TANJUNG LABU KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nurul Istiqamah Ulil Albab¹

¹ Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹ Email : nurul.istiqamah@uin-alauddin.ac.id

Sengaja dikosongkan

ABSTRAK

Daerah transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur telah berkembang menjadi desa dengan komoditi unggulan masing-masing. Desa Tanjung Labu merupakan salah satu desa yang berasal dari kawasan transmigrasi SP.VI Rantau Pulung. Keberadaan program transmigrasi telah mendorong percepatan pembangunan pada daerah-daerah di luar pulau Jawa tak terkecuali Kabupaten Kutai Timur. Desa Tanjung Labu sebagai kawasan ex-transmigrasi masih memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan potensi pengembangan lahan dalam mendukung ketransmigrasian meliputi identifikasi potensi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta komoditas unggulan yang berada dalam kawasan ex-transmigrasi untuk dikembangkan dan ditingkatkan produksinya sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur pada umumnya dan Desa Tanjung Labu pada khususnya.

Kata Kunci : lahan, transmigrasi, rantau pulung

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa. Program transmigrasi meningkatkan perannya sebagai motor pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa. Transmigrasi telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan selama beberapa

Transmigrasi sebagai contoh yang “khas” dan strategi pengembangan wilayah yang “original” di Indonesia pada dasarnya masih merupakan program yang masih dibutuhkan di daerah-daerah terutama dalam konteks pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa. Dalam konteks tersebut, maka diperlukan reorientasi pelaksanaan program transmigrasi. Reorientasi utama terkait dengan pengembangan wilayah adalah bagaimana menempatkan pemukiman/kawasan transmigrasi sehingga dapat benar-benar terintegrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya sebagaimana suatu kawasan fungsional, sehingga tidak menjadi kawasan yang bersifat eksklusif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam hal ini adalah merancang keterkaitan antara pemukiman/kawasan transmigrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya, baik keterkaitan fisik-spasial, sosial, ekonomi maupun budaya. Keterkaitan yang kuat ini diharapkan dapat mengeliminir berbagai stigma negatif dari program transmigrasi dan sekaligus akan mampu memicu

pengembangan wilayah khususnya wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa (Rustiadi dan Junaidi, 2011).

Transmigrasi dalam konteks pengembangan wilayah merupakan proses pembangunan kawasan berbasis penataan ruang dalam rangka pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha yang dimiliki untuk mencapai tujuan wilayah yang diinginkan. Paradigma baru transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi seharusnya menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan (Suparno, 2007).

Potensi ketransmigrasian merupakan kondisi kesiapan lahan terhadap kegiatan transmigrasi seperti daya dukung lahan dalam menampung kegiatan-kegiatan agraris, perkembangan populasi, serta sarana dan prasarana pendukung permukiman. Kabupaten Kutai Timur memiliki beberapa kawasan ex-transmigrasi berupa satuan permukiman (SP) yang telah berkembang menjadi desa. Desa Tanjung Labu yang terletak di Kecamatan Rantau Pulung merupakan kawasan ex-transmigrasi SP.VI Rantau Pulung. Desa Tanjung Labu memiliki tipologi berupa tanah perkebunan dengan luas wilayah 13.636 Ha. Jarak desa dari Pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu 15 km sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten adalah 65 km, dan jarak dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu 240 km.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada kondisi fisik lahan dalam wilayah administratif Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dalam kaitannya dengan potensi pengembangan lahan. Data yang digunakan untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data primer didapatkan melalui kegiatan survey atau observasi lapangan yang merupakan teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung kepada obyek penelitian untuk memahami kondisi kualitatif objek studi. Data ini terdiri atas kondisi fisik wilayah, sarana dan prasarana, penyebaran fasilitas kondisi fisik lahan, kondisi jalan, dan sebagainya. Data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka atau kajian dokumen-dokumen yang didapatkan dari instansi-instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, BAPPEDA, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Data lainnya terdiri atas data geografis wilayah/administrasi, topografi, klimatologi, hidrologi, geologi, tata guna lahan, dan jumlah penduduk.

Analisis yang digunakan untuk mengetahui potensi ketransmigrasian pada Desa Tanjung Labu sebagai kawasan ex-transmigrasi SP.VI Rantau Pulung Kecamatan Rantau Pulung yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan melihat sistem guna lahan yang sementara berkembang saat ini dan identifikasi sistem guna lahan yang berkembang di sekitarnya serta kesesuaian dengan kondisi lahan yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tanjung Labu merupakan kawasan ex-transmigrasi SP.VI Rantau Pulung yang terletak antara 117°3'0" BT - 117°15'0" BT dan 0°39'0" LS - 0°32'0" LS di kecamatan Rantau Pulung kabupaten Kutai Timur provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan sebelah utara dengan Desa Manunggal Jaya, sebelah selatan dengan Desa

Nurul Istiqamah Ulil Albab, Potensi Pengembangan Lahan Ketransmigrasian pada Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur

Kebon Agung, sebelah timur dengan Desa Kebon Agung, sebelah barat dengan Desa Himba Lestari Kecamatan Batu Ampar.

Berdasarkan hasil survey, secara umum kondisi jalan di Desa Tanjung Labu masih berupa jalan tanah dan atau pengerasan. Sedangkan prasarananya dominan berupa bangunan semi permanen. Kondisi prasarana berupa jalan desa maupun jalan lingkungan yang masih berupa jalan tanah sangat mempengaruhi aktifitas warga. Jika musim penghujan tiba, desa kadang terisolir cukup lama karena jalanan tidak bisa diakses oleh kendaraan. Selama ada pro desa warga bisa menikmati jalan yang terawat, namun sekarang hal tersebut sudah tidak ada dan warga kadang memanfaatkan jalan milik perusahaan secara terbatas.

Kantor pemerintahan seperti kantor desa merupakan bangunan semi permanen. Adapun untuk prasarana kesehatan, Desa Tanjung Labu sudah dilengkapi dengan 1 unit Puskesmas dan 1 unit UKBM. Untuk Prasarana Pendidikan memiliki sekolah setingkat TK, SD dan SMP masing-masing 1 unit. Prasarana ibadah yang dimiliki oleh desa ini berupa 2 buah masjid, 2 mushalla, 2 gereja, dan 1 pura. Adapun prasarana umum yang dimiliki Desa Tanjung Labu adalah berupa 1 unit balai pertemuan dan 100 buah sumur desa.



Gambar 1. Foto Udara Kondisi Eksisting Desa Tanjung Labu (SP.VI Rantau Pulung)

Selain permasalahan jalan, warga Desa Tanjung Labu juga belum memiliki akses terhadap air bersih. Adapun listrik dan telekomunikasi telah dinikmati oleh warga. Kondisi yang paling urgen dirasakan adalah jalanan yang belum memadai untuk menopang aktifitas keluar masuk barang komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat desa.

1. Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Menurut Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi memprioritaskan beberapa hal diantaranya bahwa:

1. Kawasan transmigrasi terintegrasi dengan kawasan permukiman penduduk yang sudah ada, membentuk suatu komunitas baru. Program penempatan mempertimbangkan keseimbangan antara penduduk asli dengan pendatang;

2. Penyediaan tanah transmigrasi mengacu pada catur tertib pertanahan nasional yaitu (1) tertib administrasi, (2) tertib hukum, (3) tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah, serta (4) lingkungan hidup;
3. Lokasi permukiman harus memenuhi kriteria 2C (*Clear & Clean*) dan 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan);
4. Pembangunan Satuan Permukiman diarahkan pada lokasi potensial dalam sistem SKP.
5. Pembangunan permukiman dirancang dengan memperhatikan :
 - a. Ketersediaan lahan tempat berusaha yang potensial, tidak bermasalah dan tidak berpotensi menimbulkan masalah;
 - b. Kawasan transmigrasi berskala besar, sehingga dengan biaya rendah tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan efisien;
 - c. Transmigran berkualitas sesuai kebutuhan dan kompetensi daerah penempatan;
 - d. Kelengkapan infrastruktur ekonomi dan fasilitas sosial secara memadai dan layak;
 - e. Ketersediaan rancangan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya yang terukur hasil dan prospeknya (disampaikan pada Diskusi Interaktif Peran Lembaga Masyarakat dalam peningkatan Ketahanan Pangan di Kawasan Transmigrasi di Bidakara, 6 Desember 2013)

Adapun perwujudan kawasan transmigrasi dirancang dan dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
3. PP No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
4. RTRW Nasional, yang tertuang dalam PP No. 26 Tahun 2008
5. RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031
6. RTRW Kabupaten Kutai Timur 2015-2035

Sejak awal dicetuskannya, program transmigrasi dimaksudkan untuk memindahkan penduduk guna mendukung pembangunan daerah tertentu. Namun, paradigma ini kemudian berubah. Perpindahan penduduk merupakan konsekuensi dari pengembangan wilayah, sehingga pembangunan wilayah transmigrasi pun menjadi berbasis kawasan. Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031 ditemukan bahwa untuk Rencana Pusat Kegiatan yang berkaitan dengan kecamatan Rantau Pulung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Pusat Kegiatan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031

Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi
Pusat Kegiatan Lokal	Bengalon dan Rantau Pulung	Sebagai pusat pendukung kegiatan Pusat Kegiatan Nasional (PjN) Sangatta Pusat Kegiatan Lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa di sekitarnya

Sedangkan untuk rencana jaringan transportasi, dalam RTRW Kalimantan Timur 2011-2031 ditemukan sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Jaringan Jalan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031

No	Klasifikasi	Nama Jaringan Jalan
1	Pembangunan Jalan Kolektor Primer 4 (K-4)	1. Ruas Jalan Sp.Batu Ampar-Rantau Pulung-Sangatta 2. Ruas Jalan Bengalon-Kawasan Industri (Dusun Muara Kaman) 3. Ruas Jalan Sangatta – Rantau Pulung

Sedangkan dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur 2015-2035 ditemukan bahwa untuk Rencana Pusat Kegiatan yang berkaitan dengan kecamatan Rantau Pulung adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Pusat Kegiatan RTRW Kabupaten Kutai Timur 2015-2035

No	Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Bengalon dan Rantau Pulung	Sebagai pusat pendukung kegiatan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sangatta Pusat Kegiatan Lokal dan pusat pertumbuhan desa-desa sekitarnya

Sedangkan untuk rencana jaringan transportasi, dalam RTRW Kalimantan Timur 2011-2031 ditemukan sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Jaringan Jalan RTRW Kabupaten Kutai Timur 2015-2035

No	Klasifikasi	Nama Jaringan Jalan
1	Jalan Arteri Primer	1. Ruas Jalan Sp.Batu Ampar-Rantau Pulung-Sangatta 2. Ruas Jalan Bengalon – Kawasan Industri (Dusun Muara Kaman) 3. Ruas Jalan Sangatta – Rantau Pulung

2. Analisis Kebijakan Pengembangan Pedesaan

Kebijakan Pembangunan sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2016-2022, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan, serta penguatan masyarakat desa. Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial,

ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa:
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur tahun 2021, Desa Tanjung Labu yang merupakan kawasan ex-transmigrasi SP VI. Rantau Pulung dalam hal Indeks Pembangunan Desa (IPD) termasuk kategori BERKEMBANG (54.87 poin) dan juga tergolong BERKEMBANG dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan nilai 0,6338.

3. Analisis Pengembangan Lahan dan Kependudukan

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kabupaten Kutai Timur akan dibangun dengan kerangka konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri dari empat pilar yaitu; a. Pilar Pembangunan Sosial (aspek kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender); b. Pilar Pembangunan Ekonomi (energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industry inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kemitraan untuk mencapai tujuan); c. Pilar Pembangunan Lingkungan (isu terkait air bersih dan sanitasi layak, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan); d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh).

Analisis Daya Dukung Lahan

Pemenuhan kebutuhan akan bahan makanan untuk keberlangsungan hidup manusia secara nyata akan diperoleh dari hasil pemanfaatan lahan, baik melalui usaha pertanian (perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan) maupun non pertanian, oleh karena itu kemampuan daya dukung lahan terhadap kehidupan di atasnya sangat perlu diketahui agar fungsi lahan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Salah satu alat yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah atau wilayah yang memberikan gambaran hubungan nyata antara manusia, pemanfaatan lahan dan lingkungannya adalah analisis daya dukung (*Carrying Capacity Ratio*) atau CCR.

Kemampuan lahan (*land capability*) dinilai menurut macam pengelolaan yang disyaratkan berdasarkan pertimbangan biofisik untuk mencegah terjadinya kerusakan lahan selama penggunaan. Kemampuan Lahan merupakan daya yang dimiliki oleh lahan untuk menanggung kerusakan lahan. Lahan datar mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari pada lahan miring.

Kesesuaian lahan (*land suitability*) dinilai berdasarkan pengelolaan khas yang diperlukan untuk mendapatkan nisbah (ratio) yang lebih baik antara manfaat/maslahat yang dapat diperoleh dan korbanan/biaya/masukan yang diperlukan.

Daya dukung (*carrying capacity*) diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan lahan yang berupa lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung lahan merupakan gabungan kemampuan dan kesesuaian lahan. Sebagai catatan bahwa daya dukung yang dimaksud di sini adalah daya dukung yang alami bukan karena rekayasa teknologi, namun demikian daya dukung lahan dapat ditingkatkan dengan teknologi akan tetapi ada batas maksimalnya.

Untuk mengetahui daya dukung lahan di Desa Mukti Jaya yang merupakan kawasan ex-transmigrasi, digunakan rumus berikut:

$$CCR = \frac{A \times r}{H \times h \times F}$$

Dimana:

- CCR = kemampuan daya dukung
- A = jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian/perkebunan
- r = frekuensi panen per hektar per tahun
- H = jumlah KK (rumah tangga)
- h = persentase jumlah penduduk yang tinggal
- F = ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani

Asumsi umum sebagai interpretasi hasil perhitungan analisis daya dukung sebagai berikut:

1. Jika $CCR > 1$

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

2. Jika $CCR < 1$

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

3. Jika $CCR = 1$

artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan.

Selain evaluasi terhadap daya dukung lahan, penilaian terhadap ketersediaan air juga perlu dilakukan. Hal ini demi mendukung keberlangsungan hidup penduduk yang tinggal dan yang akan tinggal di wilayah Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. Penghitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Penghitungan Ketersediaan (*Supply*) Air Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional.

Rumus:

$$C = \Sigma (ci \times Ai) / \Sigma Ai$$

$$R = \Sigma Ri / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA = ketersediaan air (m³/tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

C_i = Koefisien limpasan penggunaan lahan

A_i = luas penggunaan lahan *i* (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka, atau dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN)

R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait setempat

R_i = curah hujan tahunan pada stasiun *i*

M = jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A = luas wilayah (ha)

10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

Berdasarkan data yang ada, ditemukan bahwa Ketersediaan (*Supply*) Air di Desa Tanjung Labu adalah **149.625.000 m³/thn**

Penghitungan Kebutuhan (*Demand*) Air

$$\text{Rumus: } DA = N \times KHLA$$

Keterangan:

DA = Total kebutuhan air (m³/tahun)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak

1600 m³ air/kapita/tahun (2 x 800 m³ air/kapita/tahun)

dimana: 800 m³ air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan (kebutuhan air untuk menghasilkan satu satuan produk). 2.0 merupakan faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik dan lainnya.

$$DA \text{ Desa Tanjung Labu} = 798 \text{ jiwa} \times 1.600 \text{ m}^3/\text{kapita}/\text{thn} \\ = \mathbf{1.276.800 \text{ m}^3/\text{thn}}$$

Setelah dilakukan perhitungan terhadap *supply* dan *demand* terhadap air, diketahui jika *supply* lebih besar dari pada kebutuhannya maka daya dukung lahan dari sektor kesediaan air masih mencukupi. Sebaliknya jika *demand* lebih besar daripada ketersediaannya, maka kondisi tersebut menggambarkan bahwa lahan tidak memiliki daya dukung yang mencukupi untuk kebutuhan hidup warga yang bermukim di atasnya.

Analisis Kesesuaian Lahan

Ruang mempunyai tiga jenis penggunaan ruang yang mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing agar tercipta kehidupan yang dinamis antara manusia dan alam. Jenis-jenis pola ruang tersebut adalah kawasan lindung, kawasan penyangga, dan

Nurul Istiqamah Ulil Albab, Potensi Pengembangan Lahan Ketransmigrasian pada Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur

kawasan budidaya. Untuk menentukan fungsi suatu kawasan dibutuhkan data fisik suatu wilayah yaitu kemiringan, jenis tanah, dan intensitas hujan. Ketiga indikator ini mempunyai bobot skor masing berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11.1980. Adapun klasifikasi indikator sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria Penilaian Kesesuaian Lahan

No	Kriteria	Klasifikasi	Keterangan	Bobot
1	Lereng kemiringan	0-8%	Datar	20
		8-15%	Landai	40
		15-25%	Agak Curam	60
		25-45%	Curam	80
		>45%	Sangat Curam	100
2	Jenis Tanah	Aluvial, Tanah Glei, Panosol, Hidromonif Kelabu, Laterit Air tanah	Tidak Peka	25
		Latosol	Agak Peka	30
		Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Mediteran	Kurang Peka	45
		Andosol, Lateritem Grimosol, Podisol, Podsolik	Peka	60
		Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat Peka	75
3	Intensitas Hujan	0.0-13.6 mm/hh	Sangat rendah	10
		13.6 - 20.7 mm/hh	Rendah	20
		20.7-27.7 mm/hh	Sedang	30
		27.7-34.8 mm/hh	Tinggi	40
		> 34.8 mm/hh	Sangat Tinggi	50

Sumber: SK Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11.1980

Skoring dilakukan dengan mempertimbangan kondisi lahan di Desa Tanjung Labu dan dilakukan pembobotan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11.1980. Berdasarkan hasil analisis terhadap kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan yang diproyeksikan langsung dalam aplikasi GIS didapati bahwa sebagian besar wilayah Desa Tanjung Labu dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan kawasan penyangga.

Analisis Kependudukan

Proyeksi jumlah penduduk digunakan sebagai indikator upaya pengembangan wilayah. Perhitungan proyeksi penduduk Desa Tanjung Labu sampai tahun perencanaan adalah dengan menggunakan metoda trend secara eksponensial. Metode ini digunakan

dengan asumsi dinamisnya kegiatan dan pergerakan yang ada di Desa Tanjung Labu akan sangat berpengaruh pada tingginya laju pertumbuhan penduduk, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk akan semakin tinggi. Model matematika yang digunakan dalam penentuan proyeksi penduduk dengan metode eksponensial adalah sebagai berikut:

$$P_n = P_0 \cdot e^{nr}$$

Keterangan:

P_n = Jumlah Penduduk pada tahun ke- n

P_0 = Jumlah penduduk pada tahun awal perhitungan

r = Tingkat Pertumbuhan Penduduk rata-rata

n = Tahun

e = 2,7182818

Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (r) yang digunakan untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk sampai tahun rencana diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n r}{n}$$

Keterangan:

r = Tingkat Pertumbuhan Penduduk rata-rata

n = Tahun

r = Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Desa Tanjung Labu memiliki mata pencaharian mayoritas sebagai buruh dengan tingkat pendidikan rata-rata Sekolah Dasar. Wilayah ini dihuni oleh 219 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 798 Jiwa dengan komposisi laki-laki 419 jiwa dan perempuan 379 jiwa.

4. Analisis Sosial Ekonomi

Menurut Handewi Rachman (2003) komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Posisi strategis ini didasarkan pada pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim), sosial ekonomi dan kelembagaan. Penentuan ini penting dengan pertimbangan bahwa ketersediaan dan kemampuan sumberdaya (alam, modal dan manusia) untuk menghasilkan dan memasarkan semua komoditas yang dapat diproduksi di suatu wilayah secara simultan relatif terbatas. Sementara itu, Daryanto dan Hafizrianda (2018) menjelaskan bahwa komoditas unggulan mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian, dengan kata lain, komoditas unggulan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan dan pengeluaran;
- b. Mempunyai keterikatan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya;

- c. Mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi dan kualitas pelayanan;
- d. Memiliki keterkaitan dengan wilayah lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku;
- e. Memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi;
- f. Mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya;
- g. Dapat bertahan dalam jangka panjang tertentu, mulai fase kelahiran, fase pertumbuhan fase kejenuhan/ penurunan;
- h. Tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal;
- i. Pengembangannya harus mendapat berbagai bentuk dukungan, misalnya : keamanan, sosial, budaya, informasi, peluang pasar, kelembagaan, fasilitas intensif-disintensif, dll dan
- j. Pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan interaksi dengan masyarakat di wilayah perencanaan serta didukung dengan kajian literatur, diketahui bahwa karakteristik sosial budaya yang menonjol masyarakat Desa Tanjung Labu yaitu kehidupan masyarakat masih bercirikan kehidupan perdesaan. Di mana masyarakat masih banyak yang bekerja pada sektor primer yaitu pertanian. Karakteristik pertanian tercermin pada masih relatif luasnya lahan yang diusahakan sebagai lahan pertanian, terutama untuk perkebunan sawit.

Sebagian besar lahan di desa Tanjung Labu merupakan area perkebunan sawit, sehingga sawit pun menjadi komoditi utama wilayah ini. Meskipun demikian, sektor pertanian yang dikelola secara mandiri oleh warga dan menjadi komoditas utama adalah jenis padi sawah dan karet. Beberapa warga juga membudidayakan sayuran musiman. Dalam kegiatan perkebunan tersebut, warga sangat membutuhkan bantuan berupa pupuk. Untuk perkebunan buah, meskipun bukan komoditi utama namun dapat tumbuh subur yaitu rambutan dan durian. Sedangkan untuk peternakan, di Desa Tanjung Labu tidak bersifat industri, namun terbagi dalam kelompok kelompok tani.

D. KESIMPULAN

Desa Tanjung Labu merupakan kawasan ex-transmigrasi Satuan Permukiman (SP) VI Rantau Pulung dengan kondisi lahan didominasi oleh perkebunan sawit dan persawahan namun dalam jumlah terbatas. Dalam menjalankan kegiatan pertanian, penduduk Desa Tanjung Labu mengelolanya melalui kelompok-kelompok tani dengan beberapa HPL juga dikuasai oleh kelompok-kelompok tani yang ada. Lahan di Desa Tanjung Labu termasuk lahan produktif untuk pertanian maupun perkebunan dengan komoditi utama berupa sawit. Adapun peternakan maupun perikanan belum begitu berkembang di desa ini. Dalam melakukan pengembangan kawasan dengan potensi ketransmigrasian di Desa Tanjung Labu diperlukan kerja sama dan sinergi antara instansi-instansi terkait demi mewujudkan cita-cita transmigrasi. Koordinasi terkait penataan ruang kawasan transmigrasi harus dilakukan antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Kutai Timur dengan pemerintah kecamatan Rantau Pulung beserta perangkat Desa Tanjung Labu, dan OPD yang memiliki keterkaitan seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan

Nurul Istiqamah Ulil Albab, Potensi Pengembangan Lahan Ketransmigrasian pada Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur

Umum, Dinas Permukiman, dan lain-lain, sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat transmigran atas hal-hal dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta kelayakan lingkungan tempat tinggal, selain itu upaya peningkatan kualitas kerja dan usaha untuk menyokong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi poin penting untuk diperhatikan.

Sebagai wilayah dengan predikat “Berkembang”, pengembangan lahan di Desa Tanjung Labu masih mungkin untuk dilakukan dan sangat potensial untuk kegiatan-kegiatan ketransmigrasian. Pembangunan harus mengikuti ketersediaan lahan di wilayah tersebut dengan luas wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya adalah 135,8 km². Perbaikan sarana dan prasarana yang ada terutama jalan lingkungan merupakan aspek dasar dalam mewujudkan potensi pengembangan lahan di Desa Tanjung Labu.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2021. *Kecamatan Rantau Pulung dalam Angka*. Kutai Timur
- Daryanto A. dan Hafizrianda Y. 2018. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor : IPB Press.
- Junaidi, dkk . 2012. *Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya*. *Visi Publik*, 9 (1). pp. 522-534
- Koentjaraningrat. 1995. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Penerbit Djambatan, Jakarta
- Levang, P. 2003. *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Prihatin, R.B. 2013. *Revitalisasi Program Transmigrasi*. *Jurnal Aspirasi* Vol.4 no.1
- Rustiadi E. dan Junaidi. 2011. *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah*. https://repository.unja.ac.id/106/1/transmigrasi_ernan_junaidi.pdf
- Rachman, H., 2003. *Penentuan Komoditas Unggulan Nasional di Tingkat Provinsi. Makalah Lokakarya ‘Sintesis Komoditas Unggulan Nasional’*. Bogor.